

PERAN KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

(Studi Kasus Teori Habermas)

M. Taufiq Hidayah Tanjung, Cuanda Mitra Perdana, Muharri,
Ahmad Arifin

Sekolah Tinggi Agama Islam Alhikmah Tanjung Balai, Indonesia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Universitas Riau Kepulauan, Kepulauan Riau, Indonesia

taufiqhidayahtanjung97@gmail.com, cuanda4004233001@uinsu.ac.id,

muharri85@gmail.com, arifin@fekon.unrika.ac.id

Abstract

Article History

Received : 18-02-2025

Revised : 21-04-2025

Accepted : 06-12-2025

Keywords:

Role of

Communication,

Public Trust,

National Police,

Habermas Theory,

The aim of this research is to examine the role of effective communication in increasing public trust in the National Police based on Habermas' communication theory. This research uses a descriptive qualitative research method with a library research approach, which analyzes relevant literature, such as books, academic journals and research reports. The main data sources come from various references related to effective communication, Habermas' theory, and its application in the context of the National Police. The research results show that communication based on the principles of Habermas's theory, especially regarding transparency, dialogue and equality, can improve the image of the National Police in the eyes of the public. Programs such as dialogical patrols and conveying information through various media have increased public participation in discussing security issues and Polri policies. These findings indicate that responsive and humanistic two-way communication can strengthen relations between the National Police and the community, as well as build public trust in the police institution.

Pendahuluan

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial di Indonesia. Namun, beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan besar dalam mempertahankan kepercayaan publik. Berbagai kasus dan isu negatif, termasuk penyalahgunaan wewenang, lambatnya penanganan perkara, hingga minimnya transparansi pelayanan publik, telah memengaruhi citra Polri di mata masyarakat. (Abdullah, 2022)

Tahun 2022 menjadi masa yang penuh ujian bagi Polri. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat oleh Ferdy

Sambo, seorang pejabat tinggi Polri. Kasus ini tak hanya mencoreng institusi Polri tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap mereka (Chaterine, 2022). Dalam peristiwa tersebut, Ferdy Sambo menciptakan skenario palsu, termasuk laporan tentang kontak senjata yang melibatkan Brigadir Joshua. Fakta bahwa kasus ini melibatkan manipulasi bukti dan tekanan internal semakin menurunkan kredibilitas Polri. Akibatnya, Ferdy Sambo dipecat secara tidak hormat dan dijatuhi hukuman mati. (Dede Suprayitno, et.al, 2023)

Kasus tersebut berdampak besar pada persepsi publik. Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun drastis pada Agustus 2022, dibandingkan dengan Mei 2022. Lembaga Survei Indonesia juga melaporkan penurunan serupa, di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya mencapai 53% pada Oktober 2022, turun 17% dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri berada pada titik terendah di antara lembaga penegak hukum lainnya. (Ramadhan, 2022)

Presiden Joko Widodo turut menyoroti situasi ini. Pada November 2021, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 80,2%, tetapi anjlok menjadi 54% pada Agustus 2022. Presiden bahkan harus memberikan arahan langsung kepada Kapolri untuk segera memperbaiki citra institusi yang ia pimpin (Sekretariat Kabinet RI). Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya disebabkan oleh kasus besar seperti Ferdy Sambo tetapi juga oleh akumulasi masalah seperti kurangnya komunikasi efektif dan transparansi. (Chaterine, 2022) Di sinilah relevansi teori komunikasi rasional dari Jürgen Habermas menjadi penting. Habermas, tokoh komunikasi dari mazhab Frankfurt, menekankan pentingnya dialog yang transparan, jujur, dan bebas dari dominasi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan oleh Polri untuk memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan berbasis partisipasi publik. (Muhammad Ersyad Muttaqien, 2023)

Namun, penerapan komunikasi efektif oleh Polri menghadapi banyak hambatan. Persepsi negatif masyarakat yang telah terbentuk lama, lambannya proses penyelesaian laporan, dan minimnya ruang dialog antara masyarakat dan Polri menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat merasa skeptis terhadap niat baik Polri karena pengalaman buruk di masa lalu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana komunikasi efektif dapat berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi komunikasi yang dapat digunakan Polri, serta bagaimana teori Habermas dapat memberikan solusi praktis untuk mengatasi krisis kepercayaan ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan Polri mampu kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research* yang bersifat kualitatif deskriptif. (Moleong, 2019) Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi peran komunikasi efektif dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan menggunakan teori Habermas sebagai landasan analisis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh

dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami konsep komunikasi efektif, prinsip-prinsip teori Habermas, dan penerapannya untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui proses *literature review*, yaitu dengan membaca, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi dari berbagai referensi secara sistematis. (Moleong, 2019) Data yang terkumpul diolah dengan menekankan analisis mendalam terhadap poin-poin penting dan dikelompokkan berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih terperinci mengenai penerapan strategi komunikasi efektif berbasis teori Habermas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pembahasan Komunikasi

Secara etimologi, kata "komunikasi" berasal dari bahasa Latin *communicare*, yang berarti "berbagi" atau "memberitahukan." Kata ini memiliki akar dari *communis*, yang berarti "membuat sama," menunjukkan bahwa komunikasi bertujuan menciptakan kesamaan pemahaman di antara individu yang terlibat. Dengan demikian, komunikasi secara bahasa dapat dipahami sebagai proses berbagi informasi, gagasan, atau pesan untuk mencapai pemahaman yang sama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Proses ini melibatkan interaksi yang memungkinkan terciptanya keselarasan makna dalam menyampaikan pesan. (Alhidayatullah, et.al, 2022)

Menurut (Muya Syaroh, 2020) komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau ide dari seorang pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan) dengan tujuan mencapai kesepahaman atau kesamaan makna. Komunikasi juga mencakup upaya untuk membangun hubungan yang efektif antara individu, baik yang berada dalam jarak dekat maupun jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan sosial, menyampaikan ide, dan menyelesaikan masalah. Keberhasilan komunikasi terjadi ketika kedua belah pihak memahami pesan dengan makna yang sama, sehingga komunikasi menjadi salah satu aspek paling vital dalam interaksi manusia.

Komunikasi memiliki peran penting dalam organisasi atau lembaga karena berfungsi sebagai alat untuk memastikan semua anggota dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Komunikasi berperan dalam menyampaikan informasi (fungsi informatif) agar setiap individu mendapatkan pemahaman yang jelas untuk mendukung pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai sarana pengaturan (fungsi regulatif), memastikan bahwa setiap anggota memahami aturan yang berlaku dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan organisasi. Di sisi lain, komunikasi yang bersifat persuasif membantu menciptakan motivasi dan keterlibatan, di mana para pemimpin lebih memilih mendorong kerja sama melalui pendekatan yang mendukung daripada sekadar memerintah. Akhirnya, komunikasi berfungsi untuk menyatukan (fungsi integratif), membangun hubungan yang

harmonis antaranggota organisasi dengan menyediakan saluran yang memungkinkan terciptanya koordinasi dan efisiensi kerja. (Evi Zahara, 2018)

Teori Komunikasi Habernas

Menurut (Deden Ramdan, et.al, 2023) Teori komunikasi Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat di mana individu dapat berinteraksi secara bebas dan rasional tanpa adanya tekanan dari kekuatan dominan, seperti pemerintah atau pasar. Dalam perspektif ini, komunikasi harus terjadi dengan prinsip kesetaraan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan menerima informasi. Habermas menggagas konsep "*public sphere*" sebagai wadah komunikasi yang terbuka dan demokratis, yang memungkinkan terciptanya diskursus yang bebas dan mendalam antara warga negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran mengenai keterbukaan media dan keberagaman dalam konten serta kepemilikan media, yang menjadi kunci bagi terciptanya komunikasi politik yang sehat dan akuntabel dalam masyarakat

Habermas memandang komunikasi sebagai proses penting dalam membangun ruang publik yang ideal, di mana individu dapat berdiskusi secara rasional dan setara untuk mencapai konsensus demi kepentingan bersama. Namun, dengan perubahan budaya global dan munculnya ruang publik virtual, Habermas juga mengakui tantangan yang muncul. Ruang virtual memungkinkan siapa saja untuk terlibat dalam diskusi tanpa batasan geografis, tetapi sering kali sifat anonimitas dan kurangnya regulasi mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat, penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi, atau bahkan manipulasi publik. Menurut Habermas, agar komunikasi di ruang public baik fisik maupun virtual (Jaduk Gilang Pembayun, 2017) berjalan efektif, harus ada transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran kolektif yang menjunjung nilai-nilai demokratis, sehingga ruang publik dapat tetap inklusif dan mendukung tujuan bersama, bukan sekadar melayani kepentingan segelintir individu atau kelompok tertentu.

Komunikasi Efektif Yang Diterapkan Oleh Polri

Komunikasi efektif yang diterapkan oleh Polri berfokus pada membangun hubungan yang erat antara polisi dan masyarakat melalui pendekatan yang transparan, dialogis, dan berbasis kepercayaan. Salah satu bentuknya adalah program Patroli Dialogis yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, baik melalui dialog santai di wilayah patroli maupun penyampaian himbauan terkait keamanan. Polri juga mengutamakan pengelolaan informasi yang terstruktur dan valid, memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik sudah diverifikasi dengan baik untuk mencegah kesalahpahaman. Selain itu, Polri aktif menerima masukan dari masyarakat, seperti melalui ketua RT, untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran warga, sehingga langkah-langkah yang diambil lebih tepat sasaran. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Polri untuk tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menciptakan kemitraan yang saling mendukung antara polisi dan masyarakat. (I Putu Anjas Mahendra, et.al, 2024)

Menurut (Christina Aleida Tolan, 2017) dalam penelitiannya ada beberapa komunikasi efektif yang diterapkan oleh polri antara lain *pertama*, penggunaan

Berbagai Media: Polri memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti media cetak (surat kabar, spanduk, dan brosur), media elektronik (radio dan televisi), serta internet untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penggunaan internet, khususnya, memungkinkan akses informasi kapan saja dan di mana saja, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pengetahuan tentang peraturan hukum, kegiatan kepolisian, dan pelayanan yang diberikan. *Kedua*, Sosialisasi dan Edukasi: Melalui kegiatan sosialisasi, patroli dialogis, dan pertemuan langsung dengan masyarakat, Polri berusaha mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum. Dalam program ini, masyarakat diberikan informasi mengenai dampak dari pelanggaran hukum dan bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. *Ketiga*, iklan edukatif, polri menggunakan iklan sebagai salah satu sarana edukasi yang efektif. Iklan-iklan tersebut memberikan pesan tentang kepatuhan hukum, konsekuensi dari pelanggaran, serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan. Iklan yang menarik dan informatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tugas dan fungsi kepolisian.

Keempat, pendekatan humanis, komunikasi yang dilakukan oleh Polri menekankan pendekatan yang humanis, di mana polisi yang sopan, ramah, dan menghormati masyarakat membantu menciptakan hubungan yang positif. Sikap humanis ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membangun citra Polri sebagai institusi yang peduli dan bertanggung jawab. *Kelima*, penyelesaian masalah dengan responsif, polri menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah keamanan masyarakat secara cepat dan tepat. Misalnya, penurunan keributan akibat pesta minuman keras menjadi bukti nyata efektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya. Tindakan yang cepat dan tepat ini membantu masyarakat merasa aman dan percaya terhadap kemampuan Polri. *Keenam*, pelayanan yang terorganisasi, pelayanan yang diberikan Polri bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Meski masih ada beberapa kekurangan, seperti birokrasi yang terkadang berbelit, Polri terus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar masyarakat lebih puas dan merasa terbantu dalam setiap proses yang melibatkan kepolisian.

Peran Komunikasi Efektif Dapat Membantu Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Berdasarkan Teori Habermas

Komunikasi efektif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, terutama ketika didasarkan pada prinsip-prinsip Teori Habermas. Dalam teori ini, komunikasi yang ideal harus bersifat rasional, dialogis, dan terbuka, di mana semua pihak yang terlibat dapat berinteraksi dengan kebebasan untuk mencapai pemahaman bersama. Penerapan komunikasi seperti ini oleh Polri mampu menciptakan kepercayaan yang lebih kuat antara masyarakat dan institusi kepolisian. Program dialog interaktif yang diselenggarakan melalui media, seperti radio, merupakan contoh nyata dari penerapan "tindakan komunikatif" Habermas. Dalam program ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif melalui pertanyaan, saran, atau kritik yang langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian. Komunikasi dua arah ini tidak hanya memungkinkan transfer informasi, tetapi juga menciptakan rasa saling percaya karena masyarakat merasa dilibatkan secara setara dalam diskusi. Hal ini relevan dengan konsep Habermas bahwa komunikasi yang ideal mampu mengatasi

hambatan dan menghasilkan konsensus melalui interaksi yang rasional. Selain itu, transparansi dalam menyampaikan informasi melalui media berperan penting dalam mencegah kesalahpahaman dan penyebaran informasi palsu. Seperti yang diungkapkan oleh (Masitah, et.al, 2022) Masitah & Dewi (2022), media yang digunakan secara sistematis dapat memandu perhatian publik pada isu-isu penting yang relevan. Dalam konteks Polri, penyampaian informasi yang jujur dan jelas menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas, sehingga memperkuat kepercayaan publik.

Menurut (Putri Utami, et.al, 2025) Teori Habermas juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam komunikasi, di mana tidak ada dominasi atau manipulasi dalam penyampaian pesan. Subbid Penmas Polda Sumsel menerapkan hal ini dengan menggunakan bahasa yang sopan dan humanis dalam interaksi mereka. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan citra positif bagi Polri, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh kepercayaan yang tumbuh melalui dialog interaktif. Dengan berpedoman pada Teori Habermas, komunikasi efektif yang diterapkan oleh Polri mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan, dialog yang rasional, dan transparansi informasi. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi juga upaya membangun hubungan yang kokoh antara institusi dan masyarakat.

Menurut (Intan Fadilah Nasution, et.al, 2024) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri berdasarkan Teori Habermas memerlukan penerapan tindakan komunikatif yang rasional, inklusif, dan terbuka. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang berorientasi pada pemahaman bersama, di mana semua pihak yang terlibat diberi ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan, gagasan, atau kritik secara dialogis. Dalam konteks Polri, langkah ini dapat diwujudkan melalui program-program yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, seperti forum diskusi publik, dialog interaktif melalui media, atau sesi keterbukaan informasi.

Kunci keberhasilan tindakan komunikatif adalah transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan penanganan kasus. Polri juga harus responsif terhadap masukan masyarakat, menjadikan komunikasi dua arah sebagai cara untuk memperbaiki kebijakan atau layanan. Hal ini sesuai dengan prinsip Habermas bahwa komunikasi ideal dapat mengatasi hambatan kepercayaan dan menghasilkan konsensus yang didasarkan pada logika dan nilai-nilai keadilan. Ketika masyarakat melihat bahwa Polri bersikap jujur, akuntabel, dan terbuka, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan meningkat secara signifikan.

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Berdasarkan teori komunikasi Habermas, komunikasi yang rasional, terbuka, dan inklusif mampu mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui pendekatan komunikasi yang dialogis dan transparansi dalam menyampaikan informasi, Polri dapat mengatasi hambatan komunikasi dan menciptakan konsensus yang didasarkan pada saling pengertian. Program-program interaktif seperti patroli dialogis dan penggunaan media untuk menyampaikan

informasi secara langsung telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, komunikasi yang humanis dan responsif terhadap masukan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan citra positif Polri. Dalam konteks ini, teori Habermas memberikan dasar yang kuat bagi Polri untuk melakukan komunikasi yang lebih inklusif dan terbuka, yang tidak hanya fokus pada penyampaian informasi tetapi juga pada membangun hubungan yang kokoh dengan masyarakat. Keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip komunikasi efektif yang berbasis pada teori Habermas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, serta memperbaiki hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat yang lebih harmonis dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2022. Kasus Ferdy Sambo dan Polisi Kita. *Kompas.com*.
- Alhidayatullah, et.al. 2022. Metode Komunikasi Inter Personal Pada Pelayanan Pelanggan Terhadap Citra Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Takengon Kabupaten Aceh Tengah (Studi Deskriptif Keluhan tarif listrik di kampung Bebesen). *Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi*, 4 (1).
- Chaterine. 2022. Kaleidoskop 2022: Pertaruhan Citra Polri di Tengah Kelakuan Jenderal-jenderal “Nakal” Sepanjang 2022. *Kompas.com*.
- Christina Aleida Tolan. 2017. Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado). *e-journal Acta Diurna*, 6 (1).
- Dede Suprayitno, et.al. 2023. Studi Pemulihan Citra Polri dengan Metode Analisis Isi Media dalam Teks Dialog Kapolri di Televisi Berita. *Avant Garde*, 11 (1).
- Deden Ramdan, et.al. 2023. Konsep Komunikasi J urgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6 (1).
- Evi Zahara. 2018. Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Pimpinan Organisasi. *Jurnal Warta* , 2 (1).
- I Putu Anjas Mahendra, et.al. 2024. Strategi Komunikasi Kepolisian Polres Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Kinerja Patroli Dialogis Di Kecamatan Tenggarong. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 12 (2).
- Intan Fadilah Nasution, et.al. 2024. Peran Keterbukaan Komunikasi dalam Membangun Budaya Organisasi Untuk Meningkatkan Citra Diri Kepolisian. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2 (3).
- Jaduk Gilang Pembayun. 2017. Rekonstruksi Pemikiran Habermas Di Era Digital . *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 1 (1).
- Masitah, et.al. 2022. Analisis Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan Ikn. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6 (3).
- Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Muhammad Ersyad Muttaqien. 2023. Konsep Komunikasi J urgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6 (1).
- Muya Syaroh. 2020. Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Siswa Dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Jurnal Network Media*, 3 (1).
- Putri Utami, et.al. 2025. Peran Subbid Penmas dalam Membangun Komunikasi Efektif dengan Masyarakat melalui Program Radio (Studi Pada Humas Polda Sumsel). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (1).
- Ramadhan. 2022. Survei Populi Center: Kepercayaan Publik terhadap Polri Merosot. *Kompas.com*.
- Sekretariat Kabinet RI. (n.d.). Presiden Jokowi Dorong Polri Kerja Keras Kembalikan Kepercayaan Masyarakat. Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/presiden-jokowidorong-polri-kerja-keras-kembalikan-kepercayaan-masyarakat>.